



Nilai Tambah Lokal

— sebagai Ukuran Baru —

Keberhasilan Ekonomi Indonesia

Oleh:

Rudy C Tarumingkeng

Oleh:

[Prof Ir Rudy C Tarumingkeng, PhD](#)

Professor of Management NUP: 9903252922

Rektor, Universitas Cenderawasih, Papua (1978-1988, dan
Rektor, Kampus AGRO Manokwari sekarang Universitas Papua Manokwari)

Coordinator, CIDA/DIKTI SFU Burnaby BC Canada 1988-1991

Rektor, Universitas Kristen Krida Wacana, Jakarta (1991-2000)

Ketua Dewan Guru Besar, IPB-University, Bogor (2005-2006)

AI - Data Analyst, dan Ketua Senat Akademik, IBM-ASMI, Jakarta 2024-

© RudyCT Academic Series

rudyct75@gmail.com

5 Maret 2026

NILAI TAMBAH LOKAL SEBAGAI UKURAN BARU KEBERHASILAN EKONOMI INDONESIA

Abstrak

Selama beberapa dekade, keberhasilan ekonomi kerap dibaca melalui pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB), inflasi, neraca perdagangan, dan arus investasi. Namun, di era rantai nilai global (global value chains/GVC) dan ekonomi digital, “angka besar” tidak selalu identik dengan “manfaat besar” yang tinggal di dalam negeri. Karena itu, gagasan **nilai tambah lokal** (local value added) muncul sebagai ukuran baru: seberapa besar **nilai (upah, laba, pajak, pengetahuan, dan kemampuan industri)** yang *benar-benar tercipta dan tertahan di* Indonesia ketika kita memproduksi, mengekspor, atau membangun ekosistem industri. Secara konseptual, PDB sendiri adalah jumlah nilai tambah bruto yang dihasilkan unit usaha domestik. ([SIR USA](#)) Namun “nilai tambah lokal” menuntut pembacaan yang lebih tajam: bukan sekadar “ada nilai tambah”, melainkan **siapa yang menikmati, di mata rantai mana nilai tercipta**, dan **seberapa kuat keterkaitan ke ekonomi domestik**—terutama ketika produksi melibatkan input impor atau dikerjakan lintas negara (TiVA/Trade in Value Added). ([OECD](#))

Kata kunci: nilai tambah lokal, PDB, TiVA, GVC, hilirisasi, TKDN, industrial policy, daya saing, transformasi struktural.

1. Pendahuluan: Mengapa Kita Perlu Ukuran Baru?

Bayangkan dua negara yang sama-sama mencatat ekspor USD 10 miliar dari produk "X". Negara A mengekspor bahan mentah (atau produk setengah jadi) yang sebagian besar prosesnya bernilai tambah rendah. Negara B mengekspor produk akhir—dengan desain, rekayasa, software, sertifikasi, layanan purna jual, dan logistik bernilai tinggi. Keduanya bisa tampak sama "hebat" di statistik ekspor bruto, tetapi dampak ke upah tenaga kerja terampil, kemampuan industri, pajak, dan rantai pemasok lokal sangat berbeda.

Dalam konteks Indonesia, tantangan klasiknya adalah "**ekspor besar—nilai tertahan kecil**" ketika kita berada di sisi hulu komoditas atau menjadi lokasi perakitan tanpa pendalaman kemampuan (capability deepening). Di sinilah "nilai tambah lokal" menjadi kaca mata baru: ia menggeser pertanyaan dari "*berapa besar output/ekspor?*" menjadi "*berapa besar manfaat ekonomi yang menetap di Indonesia dan memperkuat struktur industri domestik?*"

Pemerintah pun—melalui beragam kebijakan hilirisasi, penguatan industri, dan local content—secara eksplisit berbicara tentang "nilai tambah" sebagai tujuan. Contoh yang paling dikenal adalah larangan ekspor bijih nikel yang dikaitkan dengan peningkatan nilai tambah melalui pengolahan di dalam negeri. ([Kementerian ESDM RI](#)) Larangan ekspor bijih bauksit (mulai Juni 2023) juga dipresentasikan sebagai upaya mendorong pemurnian/industri domestik agar pendapatan negara meningkat. ([Sekretariat Kabinet Republik Indonesia](#))

Namun, jika “nilai tambah lokal” hendak menjadi ukuran keberhasilan yang benar-benar operasional, kita perlu menjawab tiga hal:

Definisi dan indikator yang jelas (apa yang dihitung, bagaimana membedakan nilai tambah domestik vs asing),

Mekanisme penciptaan nilai (dari hulu ke hilir, dari pabrik ke layanan, dari material ke pengetahuan),

Kebijakan dan tata kelola yang membuat nilai itu bertahan dan menyebar (spillover) ke UMKM, daerah, dan tenaga kerja.

2. Memahami “Nilai Tambah Lokal”: Dari Akuntansi Nasional ke Rantai Nilai Global

2.1. PDB sebagai nilai tambah—tetapi belum cukup “tajam”

Dalam statistik resmi, PDB didefinisikan sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu negara pada periode tertentu. ([SIR USA](#)) Ini penting: sejak awal, *PDB memang “nilai tambah”*. Artinya, jika sebuah perusahaan memakai input impor mahal, lalu menjual output lebih mahal, PDB hanya menghitung nilai tambah yang terjadi di dalam negeri (output dikurangi konsumsi antara).

Namun, untuk menilai *keberhasilan ekonomi* di era GVC, definisi PDB masih “terlalu agregat” karena:

PDB tidak otomatis menjelaskan **nilai tambah domestik dalam ekspor bruto** (domestic value added in exports).

PDB tidak otomatis menjelaskan **struktur keterkaitan**: apakah nilai tambah tercipta pada pekerjaan rendah upah atau pekerjaan berkeahlian tinggi; apakah terkonsentrasi di satu enclave industri atau menyebar ke pemasok lokal.

PDB tidak otomatis menjelaskan **ketahanan**: apakah nilai tambah rentan karena bergantung pada input impor tertentu, atau kuat karena pemasok lokal dan kemampuan teknologi berkembang.

Karena itu, pendekatan *Trade in Value Added (TiVA)* dan analisis GVC menjadi pelengkap penting.

2.2. TiVA: membongkar ekspor bruto menjadi “nilai tambah domestik” dan “nilai tambah asing”

OECD menjelaskan bahwa indikator TiVA memberi wawasan tentang **kandungan nilai tambah domestik dan asing** di dalam ekspor bruto, termasuk partisipasi negara dalam GVC melalui keterkaitan “backward” (input impor yang tertanam dalam ekspor) dan “forward” (nilai tambah domestik yang dipakai negara lain untuk ekspornya). ([OECD](#))

OECD juga menyediakan definisi indikator **domestic value added in gross exports** sebagai estimasi nilai tambah yang diciptakan suatu ekonomi untuk memproduksi barang/jasa yang diekspor. ([OECD](#)) WTO menekankan bahwa TiVA membantu menelusuri asal nilai tambah dalam ekspor barang dan jasa sehingga mengurangi “double counting” yang sering muncul dalam statistik perdagangan tradisional. ([World Trade Organization](#))

Dengan kata lain:

Ekspor bruto = nilai barang/jasa yang melintasi perbatasan (bisa mengandung komponen impor berulang).

Nilai tambah domestik dalam ekspor = bagian dari ekspor yang benar-benar diciptakan oleh faktor produksi domestik (tenaga kerja, modal, teknologi, organisasi) di Indonesia.

“Nilai tambah lokal” yang kita bicarakan sebagai ukuran keberhasilan ekonomi Indonesia pada dasarnya mengarah pada:

Memperbesar porsi nilai tambah domestik dalam ekspor dan konsumsi,

Memperdalam nilai tambah (dari komoditas ke manufaktur, dari manufaktur ke layanan bernilai tinggi),

Memperluas penyebaran nilai tambah (dari perusahaan besar ke pemasok lokal, UMKM, dan daerah).

3. Mengapa Nilai Tambah Lokal Layak Menjadi Ukuran Keberhasilan (Bukan Sekadar Pertumbuhan)?

3.1. Keberhasilan ekonomi = kemampuan menciptakan dan mempertahankan nilai

Keberhasilan ekonomi modern tidak hanya soal “berapa banyak diproduksi”, melainkan “berapa besar *nilai* yang diciptakan” dan “berapa lama nilai itu bisa bertahan”. Negara yang berhasil biasanya mempunyai:

kapabilitas produksi (quality, reliability, scale),

kapabilitas inovasi (R&D, desain, engineering, software),

kapabilitas organisasi (manajemen rantai pasok, standar, sertifikasi),

kapabilitas pasar (branding, layanan, jaringan distribusi global).

Nilai tambah lokal adalah jembatan yang menghubungkan indikator makro (PDB, ekspor, investasi) dengan “kapabilitas” yang nyata.

3.2. Nilai tambah lokal memperbaiki bias “komoditas dan siklus harga”

Ekspor komoditas bisa melonjak karena harga global naik. Namun, lonjakan itu tidak selalu identik dengan pendalaman industri. Analisis berbasis nilai tambah membantu membedakan kenaikan yang didorong

harga semata vs kenaikan yang lahir dari pendalaman proses, diversifikasi produk, dan inovasi.

3.3. Nilai tambah lokal menautkan pertumbuhan dengan kualitas kerja (job quality)

Jika nilai tambah lokal meningkat melalui aktivitas berkeahlian tinggi (misalnya engineering, data, desain, pemeliharaan, sertifikasi), maka dampaknya cenderung:

menaikkan produktivitas,

menaikkan upah,

memperluas kelas menengah produktif,

memperkuat basis pajak.

Sebaliknya, pertumbuhan yang didominasi kegiatan berupah rendah bisa rapuh dan mudah tergeser otomatisasi atau relokasi.

3.4. Nilai tambah lokal menilai ketahanan dan kedaulatan ekonomi secara lebih realistis

Di era geopolitik rantai pasok, ketahanan tidak cukup dibaca dari cadangan devisa atau surplus dagang. Ketahanan juga ditentukan oleh:

ketergantungan pada input kritikal impor,

kemampuan substitusi lokal,

kemampuan memproduksi barang strategis,

fleksibilitas rantai pasok domestik.

Di sinilah nilai tambah lokal berfungsi sebagai "indikator ketahanan struktural".

4. Kerangka Konseptual: “Local Value Added” sebagai Arsitektur Ukuran Baru

Saya usulkan sebuah kerangka yang praktis untuk Indonesia: **LVA-5 (Local Value Added Five-Layer Framework)**—lima lapisan nilai tambah lokal yang bisa diukur dan dikelola.

Lapisan 1 — Nilai Tambah Produksi (Production Value Added)

Ini lapisan klasik: output dikurangi konsumsi antara, tercermin dalam PDB dan statistik industri. BPS menyediakan beragam statistik nilai tambah sektoral, termasuk publikasi PDB dan tabel input-output. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Pertanyaan manajerial: sektor mana yang paling produktif menghasilkan nilai tambah per pekerja? sektor mana yang nilai tambahnya “dangkal” karena dominan biaya input?

Lapisan 2 — Nilai Tambah Domestik dalam Ekspor (Domestic Value Added in Exports)

Lapisan ini menuntut pendekatan TiVA. OECD memformalkan indikator domestic value added in gross exports. ([OECD](#))

Pertanyaan manajerial: apakah strategi ekspor Indonesia lebih banyak menjual “konten domestik” atau sekadar menjadi kanal re-ekspor/assembly yang kandungan asingnya besar?

Lapisan 3 — Keterkaitan dan Multiplikator Domestik (Domestic Linkages & Multipliers)

Di sini, tabel input-output menjadi alat penting untuk melihat keterkaitan antar sektor, kandungan domestik, dan efek rambatan. BPS menerbitkan Tabel Input-Output Indonesia 2020 sebagai basis analisis keterkaitan. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Pertanyaan manajerial: seberapa besar industri besar “menarik” pertumbuhan pemasok lokal (metalworking, logistik, packaging, jasa profesional)?

Lapisan 4 — Nilai Tambah Kapabilitas (Capability Value Added)

Ini lapisan yang sering tidak terlihat di statistik konvensional: R&D, desain, software, standar, IP, dan pembelajaran organisasi.

Contoh menarik adalah arah reformasi TKDN yang memasukkan aspek “brainware/kemampuan intelektual” dalam penilaian, menandakan bahwa local content tidak selalu identik dengan material—tetapi juga pengetahuan dan investasi litbang. ([Kadin Indonesia](#))

Pertanyaan manajerial: apakah industri Indonesia naik kelas dari “merakit” ke “merancang”, dari “mengoperasikan” ke “menciptakan teknologi proses”?

Lapisan 5 — Nilai Tambah Sosial-Lingkungan (Social & Environmental Value Added)

Dalam ekonomi global mutakhir, nilai tambah juga ditentukan oleh kemampuan memenuhi standar keberlanjutan, traceability, dan due diligence. Kontroversi dan dinamika regulasi anti-deforestasi UE (EUDR) menunjukkan bahwa akses pasar dapat ditentukan oleh kapasitas tata kelola rantai pasok, terutama bagi komoditas seperti sawit. ([Reuters](#))

Pertanyaan manajerial: apakah peningkatan nilai tambah lokal terjadi tanpa mengorbankan ekosistem, atau justru menambah biaya sosial yang kelak menjadi “liability” pasar?

5. Cara Mengukur Nilai Tambah Lokal secara Operasional di Indonesia

5.1. Indikator inti (core dashboard)

Agar nilai tambah lokal menjadi ukuran keberhasilan yang konsisten, Indonesia dapat menggunakan “dashboard” yang relatif stabil:

PDB dan PDB per kapita berbasis produktivitas (nilai tambah per pekerja / per jam kerja)

Domestic Value Added in Exports (DVA/X) dan **Foreign Value Added in Exports** (FVA/X) (kerangka TiVA) ([OECD](#))

Indeks keterkaitan domestik (backward/forward linkages) berbasis IO table ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Share jasa bernilai tinggi dalam ekspor/manufaktur (logistik, keuangan, IT, desain, sertifikasi) (TiVA juga membantu mengungkap “services content”) ([OECD](#))

R&D intensity dan output inovasi (patent, desain industri, produk baru, tingkat otomasi)

TKDN dan local procurement effectiveness (khususnya belanja pemerintah/BUMN) sebagai instrumen pembentuk permintaan domestik—dengan kehati-hatian agar tidak memicu inefisiensi.

Reformasi TKDN melalui Permenperin 35/2025 dan pemberitaan tentang penyederhanaan/penataan TKDN menandakan fokus pada efektivitas dan transparansi. (imc.kemenperin.go.id)

5.2. Tiga metode pengukuran yang saling melengkapi

(a) Metode makro (National Accounts & IO):

Menggunakan PDB sektoral dan IO table untuk menghitung nilai tambah, keterkaitan, dan multiplier domestik. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

(b) Metode perdagangan nilai tambah (TiVA):

Mengukur DVA dalam ekspor, FVA, serta partisipasi GVC backward/forward. ([OECD](#))

(c) Metode mikro (firm-level):

Menghitung value added per perusahaan: pendapatan minus input antara; memisahkan input lokal vs impor; memetakan pemasok tier-1 hingga tier-n; serta mengukur pembelajaran (training, sertifikasi, R&D).

Ketiganya perlu “dijahit” dalam kebijakan: makro memberi peta besar; TiVA memberi posisi Indonesia dalam rantai global; mikro memberi detail bottleneck dan strategi intervensi.

6. Mesin Penciptaan Nilai Tambah Lokal: Dari Komoditas ke Ekosistem

Nilai tambah lokal tumbuh bukan karena slogan, melainkan karena mesin (mechanisms) berikut bekerja serempak:

6.1. Hilirisasi dan upgrading industri: bukan hanya smelter

Hilirisasi sering dipahami sebagai membangun smelter. Padahal, nilai tambah lokal terbesar biasanya datang saat hilirisasi berubah menjadi **ekosistem**:

upstream: pertambangan/pertanian yang memenuhi standar kualitas & ESG,

midstream: pemurnian/pengolahan (smelter/refinery),

downstream: material lanjutan, komponen, produk akhir,

services: engineering, maintenance, software, logistik, pembiayaan, sertifikasi.

Kebijakan larangan ekspor bijih nikel sejak Januari 2020 misalnya, sejak awal dinarasikan untuk mendorong pengolahan domestik agar nilai tambah meningkat. ([Kementerian ESDM RI](#)) Perkembangan berikutnya mengarah pada ekosistem baterai EV—BKPM bahkan menyampaikan

kesiapan produksi massal baterai EV (April 2024) dan peresmian investasi terkait ekosistem baterai. (bkpm.go.id)

6.2. Pembentukan permintaan domestik yang cerdas: belanja pemerintah, BUMN, dan standar

Di banyak negara, industrial upgrading terjadi karena ada “demand pull” yang stabil—sering kali lewat pengadaan pemerintah dan BUMN. Kebijakan TKDN menjadi salah satu instrumen. Reformasi TKDN (Permenperin 35/2025) diposisikan untuk memperkuat industri nasional, membuat proses lebih transparan/mudah, dan memperluas akses industri kecil (misalnya melalui self declare). (imc.kemenperin.go.id)

Tetapi demand pull harus “cerdas”:

hindari proteksi buta yang menghasilkan produk mahal dan kalah mutu,

pastikan ada **peta jalan peningkatan kapabilitas** (quality ladder),

gabungkan dengan **insentif R&D, standar, dan transfer teknologi**.

6.3. Spillover ke pemasok lokal: “Local content” yang nyata adalah “local supplier upgrading”

Nilai tambah lokal yang sehat tercermin ketika:

pemasok lokal naik dari tier rendah ke tier lebih tinggi,

UMKM masuk sebagai vendor tersertifikasi,

industri jasa profesional lokal tumbuh (laboratorium uji, audit, desain, legal, logistik).

Tanpa spillover, hilirisasi bisa menjadi enclave: pabrik besar berdiri, tetapi pemasok lokal tidak tumbuh, dan input tetap impor.

6.4. Human capital: nilai tambah lokal pada akhirnya adalah nilai tambah manusia

Kenaikan nilai tambah lokal yang berkelanjutan selalu punya tanda yang sama: peningkatan keterampilan, sertifikasi, disiplin proses, dan budaya kualitas. Di sinilah pendidikan vokasi, politeknik, pelatihan industri, dan kolaborasi kampus–industri menentukan.

7. Studi Kasus Naratif: Membaca Nilai Tambah Lokal dari “Cerita Lapangan”

7.1. Kasus 1 — Nikel: dari bijih ke baterai, lalu ke “rantai nilai”

Narasi sederhana:

Di sebuah kawasan industri, dua dekade lalu truk-truk mengangkut bijih. Nilainya ditentukan pasar global, margin domestik relatif tipis, pekerjaan banyak tetapi berkeahlian rendah. Lalu kebijakan berubah: bijih tidak boleh lagi diekspor mulai Januari 2020. ([Kementerian ESDM RI](#)) Smelter dibangun, teknisi baru dibutuhkan, sistem pemeliharaan dan laboratorium uji muncul. Tahun-tahun berikutnya, pemerintah dan BKPM menarasikan langkah lebih jauh: ekosistem baterai kendaraan listrik, bahkan rencana/eksekusi produksi massal baterai EV. ([bkpm.go.id](#))

Apa ukuran keberhasilannya bila memakai “nilai tambah lokal”?

bukan sekadar nilai ekspor,

melainkan: berapa persen input (bahan kimia, mesin, spare part, jasa engineering) yang mulai dipasok domestik,

berapa banyak tenaga kerja lokal naik kelas menjadi operator, teknisi, supervisor, engineer,

apakah muncul perusahaan lokal yang mampu membuat komponen (casing, kabel, sistem monitoring, software),

apakah nilai tambah menyebar ke UMKM (makanan, transportasi, perumahan) atau hanya terkunci pada enclave industri.

Catatan geopolitik:

Kebijakan nikel juga memicu sengketa dagang di WTO (DS592) terkait pembatasan ekspor bahan baku. ([World Trade Organization](#)) Ini menunjukkan bahwa nilai tambah lokal juga harus “berhadapan” dengan tata aturan perdagangan internasional: strategi industrialisasi perlu kecermatan hukum, diplomasi ekonomi, dan desain kebijakan yang tahan uji.

7.2. Kasus 2 — Bauksit: industrialisasi sebagai “lompatan fiskal dan industri”

Ketika pemerintah mengumumkan larangan ekspor bijih bauksit mulai Juni 2023, narasinya tegas: dorong pengolahan/pemurnian domestik. Bahkan ada estimasi peningkatan pendapatan negara dari industrialisasi bauksit. ([Sekretariat Kabinet Republik Indonesia](#))

Pelajaran nilai tambah lokal:

Bauksit bukan hanya soal alumina/aluminium, tetapi juga:

listrik murah dan andal (energi intensif),

standar lingkungan,

logistik bahan baku,

downstream: komponen otomotif, kemasan, konstruksi,

recycling aluminium.

Jika Indonesia hanya berhenti pada pemurnian tanpa downstream dan tanpa pemasok lokal yang tumbuh, nilai tambah lokal bertambah—tetapi belum maksimal.

7.3. Kasus 3 — Sawit, oleokimia, dan “nilai tambah yang berhadapan dengan kebijakan”

Sawit sering dipandang hanya sebagai komoditas. Padahal rantai nilai turunannya besar: oleokimia, surfaktan, kosmetik, biodiesel, pangan olahan. Namun, pengalaman kebijakan DMO/DPO pada 2022 menunjukkan bahwa desain kebijakan bisa menciptakan “biaya transisi” yang signifikan untuk industri turunan tertentu (misalnya produsen oleokimia yang tidak memproduksi minyak goreng). ([ANTARA News Sumatera Selatan](#))

Selain itu, akses pasar juga ditentukan regulasi lingkungan dan traceability. EUDR (regulasi anti-deforestasi UE) memunculkan beban kepatuhan yang berat, terutama bagi smallholders; implementasinya bahkan beberapa kali ditunda menurut pemberitaan. ([Reuters](#))

Maknanya untuk “nilai tambah lokal”:

nilai tambah lokal bukan hanya *produksi*, tetapi juga *governance capability*: kemampuan ketertelusuran, sertifikasi, kepatuhan, dan data supply chain,

tanpa itu, nilai tambah bisa “tersumbat” karena akses pasar menyempit atau harga didiskon.

7.4. Kasus 4 — Rumah sakit dan pengadaan: ketika nilai tambah lokal “lahir dari belanja”

Mari ambil ilustrasi sektor layanan publik: rumah sakit.

Dua skenario pengadaan alat kesehatan (alkes):

RS membeli alkes impor lengkap, vendor luar menang tender, pemeliharaan juga vendor luar; teknisi lokal hanya pengguna.

RS membeli alkes dengan komponen lokal lebih tinggi, ada perakitan domestik, ada pusat pelatihan teknisi, ada vendor lokal untuk maintenance, ada laboratorium kalibrasi domestik.

Keduanya sama-sama “menghasilkan layanan kesehatan”. Namun, skenario (2) menciptakan:

lapangan kerja teknis,

kompetensi pemeliharaan,

perusahaan jasa kalibrasi,

peluang manufaktur komponen sederhana,

data dan inovasi layanan (software, integrasi sistem).

Di sinilah kebijakan local procurement dan TKDN bisa relevan—asal disertai standar mutu klinis yang ketat, agar tidak menurunkan keselamatan pasien.

8. Peran Kebijakan: Dari “Target Angka” ke “Desain Ekosistem”

8.1. Tiga pilar kebijakan nilai tambah lokal

Pilar A — Kebijakan industri dan investasi yang selektif (selective industrial policy):

Fokus pada sektor dengan potensi spillover tinggi: kendaraan listrik/baterai, elektronik tertentu, petrokimia/kimia, agroindustri modern, farmasi/alkes, industri maritim, dan ekonomi digital.

Pilar B — Kebijakan perdagangan dan standar (trade + standards):

dorong ekspor bernilai tambah tinggi,

negosiasi akses pasar,

antisipasi hambatan non-tarif (EUDR, standar karbon, sertifikasi),

gunakan TiVA untuk mengidentifikasi subsektor yang paling efektif menaikkan DVA.

Pilar C — Kebijakan kapabilitas (skills, R&D, supplier upgrading):

insentif litbang industri,

pusat uji dan sertifikasi,

program pengembangan pemasok lokal,

skema alih teknologi dan pembelajaran.

8.2. TKDN sebagai instrumen: manfaat dan kehati-hatian

Reformasi TKDN (Permenperin 35/2025) dan berbagai rilis Kemenperin menekankan penyederhanaan, kemudahan, transparansi, dan dukungan untuk industri kecil. (imc.kemenperin.go.id) Secara prinsip, TKDN bisa:

menciptakan permintaan awal (initial market) bagi industri domestik,

mendorong substitusi impor yang masuk akal,

mempercepat pembelajaran.

Namun, TKDN juga berisiko jika:

dijadikan target angka tanpa strategi mutu,

memunculkan biaya tinggi dan keterlambatan proyek,

membuka ruang “compliance game” (angka naik di dokumen, tidak naik di kapabilitas).

Karena itu TKDN sebaiknya diposisikan sebagai **alat** dalam *peta jalan peningkatan kapabilitas*, bukan sebagai tujuan tunggal.

9. Risiko dan Trade-Off: Nilai Tambah Lokal yang Sehat vs Nilai Tambah Lokal yang Semu

9.1. Risiko 1 — Enclave industrialization

Pabrik berdiri, ekspor naik, tetapi pemasok lokal tidak tumbuh. Ini terjadi jika:

input kritikal tetap impor,

tenaga ahli didominasi luar,

UMKM lokal tidak masuk rantai pemasok,

inovasi tidak terjadi.

Solusi: program supplier development, local engineering services, dan standardization ecosystem.

9.2. Risiko 2 — Biaya ekonomi dan inflasi industri

Local content yang dipaksakan bisa menaikkan biaya. Jika biaya ini menular ke harga barang strategis (energi, pangan, kesehatan), masyarakat menanggung beban.

Solusi: pendekatan bertahap (phased), kompetisi sehat, benchmarking mutu, dan dukungan produktivitas (bukan proteksi permanen).

9.3. Risiko 3 — Retaliasi dagang dan ketidakpastian pasar

Sengketa WTO terkait bahan baku (misalnya kasus DS592 terkait nikel) memperlihatkan bahwa kebijakan nilai tambah lokal harus memperhitungkan aturan perdagangan dan diplomasi. ([World Trade Organization](#))

Solusi: desain kebijakan yang kuat secara legal, instrumen insentif yang WTO-consistent, dan negosiasi ekonomi.

9.4. Risiko 4 — “Nilai tambah” yang merusak lingkungan

Jika hilirisasi menaikkan output tetapi merusak ekosistem, maka biaya lingkungan dapat berubah menjadi hambatan pasar (misalnya melalui regulasi deforestasi atau standar keberlanjutan). ([Reuters](#))

Solusi: integrasikan ESG sejak awal: energi bersih, pengelolaan limbah, traceability, dan tata kelola lahan.

10. Roadmap Implementasi: Bagaimana Menjadikan Nilai Tambah Lokal “Ukuran Resmi” Keberhasilan?

10.1. Tahap 1 (1–2 tahun): Standarisasi indikator & “satu dashboard nasional”

Integrasikan PDB sektoral, IO table, dan indikator TiVA sebagai dashboard publik.

Gunakan IO table (mis. IO 2020 BPS) untuk memetakan sektor prioritas yang multiplier domestiknya besar. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Bangun metrik “domestic value added per unit investment” di proyek strategis.

10.2. Tahap 2 (3–5 tahun): Program pemasok lokal & jasa bernilai tinggi

Program “1.000 pemasok naik kelas” untuk sektor prioritas (metal parts, chemical inputs, industrial services, calibration labs).

Insentif engineering lokal, pusat uji, sertifikasi, dan layanan purna jual.

10.3. Tahap 3 (5–10 tahun): Naik kelas ke knowledge-intensive value added

Target: naiknya porsi jasa bernilai tinggi dalam ekspor (desain, software, after-sales) dan naiknya intensitas R&D.

Peta jalan IP dan standard-setting (Indonesia ikut menentukan standar, bukan hanya mengikuti).

11. Kesimpulan: “Indonesia Sukses” = Indonesia yang Menangkap Nilai

Jika kita ringkas, *nilai tambah lokal* sebagai ukuran baru keberhasilan ekonomi Indonesia membawa perubahan paradigma:

Dari volume ke kualitas nilai: bukan hanya “berapa besar ekspor/produksi”, tetapi “berapa besar nilai domestik yang tertahan dan menyebar”. ([OECD](#))

Dari proyek ke ekosistem: hilirisasi bukan sekadar pabrik, melainkan jaringan pemasok, layanan engineering, SDM, dan inovasi. ([bkpm.go.id](#))

Dari proteksi ke kapabilitas: TKDN dan belanja negara perlu diarahkan untuk menaikkan mutu dan produktivitas, dengan tata kelola yang transparan. ([imc.kemenperin.go.id](#))

Dari akses pasar ke tata kelola rantai pasok: kemampuan traceability dan kepatuhan lingkungan menjadi bagian dari “nilai tambah” modern. ([Reuters](#))

Akhirnya, ukuran keberhasilan ekonomi yang paling masuk akal untuk Indonesia bukan semata pertumbuhan angka agregat, melainkan **kemampuan nasional menangkap nilai**—dalam bentuk pekerjaan berkualitas, pemasok lokal yang naik kelas, penerimaan negara yang kuat, inovasi yang tumbuh, dan daya saing yang tahan guncangan global.

[Reuters](#)

[Reuters](#)

[Reuters](#)

[Reuters](#)

[AP News](#)

Glosarium

Backward linkages (keterkaitan ke belakang): Derajat keterhubungan suatu sektor/industri pada **input antara** (termasuk impor) yang dipakai untuk menghasilkan output/ekspor; dalam analisis GVC sering dipakai untuk membaca "ketergantungan input" dan partisipasi GVC dari sisi pembeli. ([OECD](#))

Bobot Manfaat Perusahaan (BMP): Komponen penilaian manfaat ekonomi yang melekat pada perusahaan dalam rezim TKDN terbaru (berpasangan dengan sertifikasi TKDN), untuk menilai kontribusi yang lebih luas dari sekadar kandungan material. ([BPK Regulations](#))

Domestic Value Added (DVA) / Nilai tambah domestik: Bagian nilai dalam output/ekspor yang **diciptakan oleh faktor produksi domestik** (tenaga kerja, modal, organisasi, dan pajak-produksi bersih) di dalam negeri. ([OECD](#))

Domestic value added in gross exports (DVA dalam ekspor bruto): Estimasi nilai tambah yang diciptakan suatu ekonomi untuk memproduksi barang/jasa yang diekspor; indikator kunci TiVA untuk membedakan "ekspor besar" vs "nilai domestik yang tertahan". ([OECD](#))

Due diligence rantai pasok: Proses uji kepatuhan berbasis data (asal bahan, ketertelusuran, risiko deforestasi/tenaga kerja, dsb.) yang makin menentukan akses pasar dan harga dalam perdagangan global. ([Reuters](#))

EUDR (EU Deforestation Regulation): Regulasi Uni Eropa terkait pencegahan deforestasi dalam rantai pasok komoditas tertentu (mis. sawit, kedelai, kakao) yang menuntut ketertelusuran dan bukti

kepatuhan; implementasinya mengalami penundaan dalam pemberitaan. ([Reuters](#))

Enclave industrialization (industrialisasi enclave): Pola industrialisasi ketika pabrik/industri beroperasi tetapi **keterkaitan** dengan pemasok lokal lemah, transfer pengetahuan minim, dan manfaat ekonomi terkonsentrasi sempit.

Ekspor bruto (gross exports): Nilai perdagangan lintas batas yang tercatat setiap kali barang/jasa melintasi perbatasan; dapat mengandung “penghitungan ganda” bila komponen melintasi perbatasan berulang. ([World Trade Organization](#))

Foreign Value Added (FVA) / Nilai tambah asing: Bagian nilai dalam ekspor suatu negara yang berasal dari input luar negeri (impor antara) yang “tertanam” dalam barang/jasa ekspor. ([OECD](#))

GVC (Global Value Chains) / Rantai nilai global: Fragmentasi proses produksi lintas negara, di mana nilai diciptakan di banyak lokasi (hulu–tengah–hilir) termasuk jasa pendukung. ([OECD](#))

Hilirisasi (downstreaming): Kebijakan/strategi mendorong pengolahan komoditas di dalam negeri untuk menaikkan nilai tambah (mis. nikel, bauksit). ([Ministry of Energy and Mineral Resources](#))

Input antara (intermediate consumption): Barang/jasa yang habis dipakai dalam proses produksi (bahan baku, komponen, energi, jasa produksi) sehingga tidak menjadi barang akhir. ([OECD](#))

Input–Output (I–O) / Tabel Input–Output: Kerangka statistik yang memetakan aliran input–output antar sektor sehingga dapat menghitung keterkaitan, multiplier, dan struktur ekonomi. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Kandungan impor (import content): Proporsi input impor yang diperlukan untuk menghasilkan output/ekspor; penting untuk menilai “kedalaman domestik” dari suatu ekspor. ([World Trade Organization](#))

Keterkaitan ke depan (forward linkages): Kontribusi nilai tambah domestik suatu sektor/negara yang kemudian dipakai pihak lain (negara/sektor lain) dalam produksi/eksportnya. ([OECD](#))

Local procurement (pengadaan lokal): Kebijakan/praktik pembelian barang/jasa dari pemasok domestik untuk mendorong pembelajaran industri, substitusi impor yang rasional, dan sebaran manfaat ekonomi. ([Indonesia Manufacturing Center](#))

Nilai tambah (value added): Selisih antara nilai output dan konsumsi antara; secara makro menjadi dasar konsep PDB. ([Sirusa](#))

Nilai tambah lokal (local value added): Penekanan kebijakan/analisis pada **nilai yang benar-benar tercipta dan tertahan** di Indonesia (upah, laba, pajak, kapasitas pemasok, pengetahuan), termasuk kualitas sebarannya ke ekonomi domestik. ([OECD](#))

Non-tariff measures (NTM) / hambatan non-tarif: Kebijakan di luar tarif (standar, sertifikasi, ketertelusuran, aturan lingkungan) yang dapat memengaruhi akses pasar dan biaya kepatuhan. ([AP News](#))

P3DN (Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri): Program pemerintah untuk mendorong penggunaan produk domestik dalam belanja pemerintah/BUMN, sering terkait TKDN. ([Kadin Indonesia](#))

PDB (Produk Domestik Bruto): Jumlah nilai tambah yang dihasilkan seluruh unit usaha dalam suatu negara pada periode tertentu (nilai barang/jasa akhir). ([Sirusa](#))

Partisipasi GVC: Ukuran keterlibatan suatu ekonomi dalam rantai nilai global, biasanya melalui indikator backward/forward linkages dan komposisi DVA/FVA dalam ekspor. ([OECD](#))

SCM Agreement (WTO): Perjanjian WTO tentang subsidi dan tindakan imbalan (countervailing measures) yang relevan dalam sengketa bea imbalan, termasuk biodiesel. ([World Trade Organization](#))

Self declare (TKDN): Mekanisme deklarasi mandiri tertentu untuk industri kecil dalam proses sertifikasi TKDN (dengan syarat/validasi sesuai aturan), bagian dari reformasi TKDN. ([Indonesia Manufacturing Center](#))

Services content of exports (kandungan jasa dalam ekspor): Porsi nilai jasa (logistik, keuangan, IT, engineering, desain, dsb.) yang melekat pada ekspor barang/manufaktur; sering menjadi sumber nilai tambah tinggi. ([OECD](#))

Spillover (efek rambatan): Penyebaran manfaat dari industri inti ke pemasok lokal, UMKM, tenaga kerja, dan daerah melalui pembelajaran, permintaan input, standardisasi, dan transfer praktik.

Standar & sertifikasi: Instrumen mutu/keamanan/keberlanjutan yang menentukan kelayakan produk masuk rantai pasok dan pasar; juga sarana "naik kelas" pemasok. ([Reuters](#))

Substitusi impor (import substitution): Penggantian input impor dengan produksi domestik—idealnya dilakukan selektif, berbasis daya saing, dan disertai peningkatan produktivitas.

TiVA (Trade in Value Added): Pendekatan/indikator yang membongkar perdagangan bruto menjadi asal nilai tambah domestik dan asing, untuk membaca rantai nilai global dan kontribusi nyata perdagangan pada ekonomi. ([OECD](#))

TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri): Ukuran kandungan domestik dalam barang/jasa (material, tenaga kerja, biaya pabrik, dan dalam kebijakan terbaru juga unsur kemampuan intelektual/brainware tertentu) yang dipakai dalam kebijakan P3DN/pengadaan. ([Kemenperin](#))

Upgrading (naik kelas) rantai nilai: Perpindahan dari aktivitas bernilai tambah rendah (ekstraksi/perakitan) ke aktivitas bernilai tambah tinggi (rekayasa, desain, sistem, brand, layanan purna jual).

WTO DS592 (Indonesia—Measures Relating to Raw Materials): Sengketa di WTO terkait kebijakan Indonesia mengenai bahan baku (termasuk nikel) yang dipersoalkan Uni Eropa. ([World Trade Organization](#))

Daftar Pustaka (APA 7)

Badan Pusat Statistik. (n.d.). Produk Domestik Bruto (PDB) (Metadata variabel). ([Sirusa](#))

Badan Pusat Statistik. (2025, 16 Oktober). Produk Domestik Bruto Indonesia Triwulanan 2021–2025. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Badan Pusat Statistik. (2025, 27 Januari). Tabel Input-Output Indonesia 2020. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia. (2019, 2 September). Biji nikel tidak boleh diekspor lagi per Januari 2020. ([Ministry of Energy and Mineral Resources](#))

Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. (2022, 21 Desember). Pemerintah putuskan larang ekspor bijih bauksit mulai Juni 2023. ([Sekretariat Kabinet Republik Indonesia](#))

Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal. (2024, 29 April). Bukti nyata hilirisasi nikel, Indonesia siap produksi massal baterai kendaraan listrik pada April 2024. ([Badan Koordinasi Penanaman Modal](#))

Organisation for Economic Co-operation and Development. (n.d.). Trade in value-added (TiVA). ([OECD](#))

Organisation for Economic Co-operation and Development. (n.d.).
Domestic value added in gross exports (Indicator). ([OECD](#))

Organisation for Economic Co-operation and Development. (2023). ICIO–
TiVA highlights: GVC indicators for Indonesia. ([OECD](#))

World Trade Organization. (n.d.). Indonesia—Measures relating to raw
materials (DS592). ([World Trade Organization](#))

World Trade Organization. (2022, 30 November). Indonesia—Measures
relating to raw materials: Report of the Panel. ([World Trade Organization](#))

World Trade Organization. (n.d.). Trade in value added and global value
chains: Country profiles explanatory notes. ([World Trade Organization](#))

Kementerian Perindustrian Republik Indonesia. (2025, 11 September).
Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 35 Tahun
2025 tentang Ketentuan dan Tata Cara Sertifikasi TKDN dan Bobot
Manfaat Perusahaan. ([BPK Regulations](#))

Kementerian Perindustrian Republik Indonesia. (2025, 15 September).
Menperin luncurkan reformasi kebijakan TKDN: Lebih murah, mudah,
cepat, dan transparan. ([Indonesia Manufacturing Center](#))

Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia. (2025, 17 Desember).
Kemenperin sosialisasikan petunjuk teknis penghitungan TKDN barang
dan jasa industri. ([Kadin Indonesia](#))

Kementerian Perindustrian Republik Indonesia. (2026, 2 Januari).
Kemenperin sosialisasikan petunjuk teknis penghitungan TKDN barang
dan jasa industri. ([Kemenperin](#))

Reuters. (2025, 23 September). EU will delay anti-deforestation law by
another year, commissioner says. ([Reuters](#))

Reuters. (2025, 18 Desember). EU countries approve year-long delay to
deforestation law. ([Reuters](#))

Associated Press. (2024, 2 Oktober). Countries, businesses and trade officials urge EU to rethink deforestation regulation. ([AP News](#))

ANTARA News. (2022, 12 Maret). Pabrik oleokimia stop produksi terdampak kebijakan DMO sawit. ([ANTARA News Sumatera Selatan](#))

World Trade Organization. (2025, 22 Agustus). WTO panel issues report regarding EU duties on imports of biodiesel from Indonesia. ([World Trade Organization](#))

Reuters. (2025, 22 Agustus). WTO panel backs Indonesia on several counts in biodiesel row with EU. ([Reuters](#))

Tautan sumber (untuk setiap entri daftar pustaka)

[1] <https://sirusa.web.bps.go.id/metadata/variabel/84107>

[2]

<https://www.bps.go.id/id/publication/2025/10/16/04bf932a1a65d15545e6de15/produk-domestik-bruto-indonesia-triwulanan-2021-2025.html>

[3]

<https://www.bps.go.id/id/publication/2025/01/27/ea74e60a8662a70a734fa431/tabel-input-output-indonesia-2020.html>

[4] <https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/bijih-nikel-tidak-boleh-diekspor-lagi-per-januari-2020>

[5] <https://setkab.go.id/pemerintah-putusan-larang-ekspor-bijih-bauksit-mulai-juni-2023/>

[6] <https://www.bkpm.go.id/id/info/siaran-pers/bukti-nyata-hilirisasi-nikel-indonesia-siap-produksi-massal-baterai-kendaraan-listrik-pada-april-2024>

[7] <https://www.oecd.org/en/topics/sub-issues/trade-in-value-added.html>

[8] <https://www.oecd.org/en/data/indicators/domestic-value-added-in-gross-exports.html>

[9] <https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/topics/policy-sub-issues/trade-in-value-added/tiva-2023-IDN.pdf>

[10] https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds592_e.htm

[11] https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/592r_e.pdf

[12]

https://www.wto.org/english/res_e/statis_e/miwi_e/explanatory_notes_e.pdf

[13] <https://peraturan.bpk.go.id/Download/395179/permenperin-no-35-tahun-2025.pdf>

[14] <https://imc.kemenperin.go.id/berita/menperin-luncurkan-reformasi-kebijakan-tkdn%3A-lebih-murah-mudah-cepat-dan-transparan>

[15] <https://kadin.id/kabar/kemenperin-sosialisasikan-petunjuk-teknis-penghitungan-tkdn-barang-dan-jasa-industri/>

[16] <https://bbt.kemenperin.go.id/blog/kemenperin-sosialisasikan-petunjuk-teknis-penghitungan-tkdn-barang-dan-jasa-industri>

[17] <https://www.reuters.com/sustainability/climate-energy/eu-will-delay-anti-deforestation-law-by-another-year-commissioner-says-2025-09-23/>

[18] <https://www.reuters.com/sustainability/climate-energy/eu-countries-approve-year-long-delay-deforestation-law-2025-12-18/>

[19] <https://apnews.com/article/eu-deforestation-eudr-indonesia-brazil-3290bc806068914ba88a3c676235b8f5>

[20] <https://sumsel.antaranews.com/berita/627537/pabrik-oleokimia-stop-produksi-terdampak-kebijakan-dmo-sawit>

[21] https://www.wto.org/english/news_e/news25_e/618r_e.htm

[22] <https://www.reuters.com/sustainability/climate-energy/wto-panel-backs-indonesia-several-counts-in-biodiesel-row-with-eu-2025-08-22/>

Copilot for this article - Chatgpt 5.2 Thinking. Access date: 5 Maret 2026
Prompting on Writer's account ([Rudy C Tarumingkeng](#))

<https://chatgpt.com/c/69a94b1b-12d8-83a1-9529-e5939d80f3c6>